

Judul : Sepanjang tahun 2025 ada 11 OTT KPK, korupsi masih terjadi, perlu reformasi sistemik
Tanggal : Senin, 29 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Sepanjang Tahun 2025 Ada 11 OTT KPK

Korupsi Masih Terjadi, Perlu Reformasi Sistemik

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 11 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan praktik korupsi masih terjadi di berbagai daerah serta melibatkan kementerian dan lembaga negara. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, jumlah OTT tersebut menjadi catatan yang memprihatinkan. Menurutnya, OTT mencerminkan masih berlangsungnya tindak pidana korupsi di berbagai lini, meskipun upaya pencegahan terus dilakukan. Budi menjelaskan, hasil penindakan sepanjang 2025 menunjukkan modus korupsi yang semakin beragam. Praktik tersebut kerap melibatkan penyalahgunaan jabatan, aliran dana berpijak, serta keterkait-

an kepentingan keluarga dan politik. Ia menilai, penindakan merupakan bentuk keberhasilan sekaligus tantangan besar dalam pemberantasan korupsi nasional. Oleh karena itu, kementerian, lembaga, dan Pemerintah daerah diminta menutup celah sistemik yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran. Ia menegaskan, perbaikan sistem dan tata kelola harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. "Penindakan penting, tetapi pencegahan harus diperkuat agar korupsi tidak berulang," kata Budi, Sabtu (27/12/2025). Wakil Ketua KPK Fitrah Rochayahanto mengungkapkan, selama hampir satu tahun ini, KPK menetapkan 118 tersangka dan memproses ratusan perkara. Rinciannya, sebanyak 69 perkara

pada tahap penyelidikan, 110 perkara pada tahap penyidikan, 112 perkara pada tahap penuntutan. Kemudian, sebanyak 73 perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), serta 75 perkara telah dilaksanakan eksekusinya. Selain itu, KPK telah memulihkan aset negara sebesar Rp 1,53 triliun. "Angka tersebut menjadi angka tertinggi di lima tahun terakhir ini," imbuhnya. Masalahnya OTT yang dilakukan KPK menjadi sorotan dalam perayaan Natal 2025. Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menyerukan tobat nasional sebagai refleksi moral atas krisis integritas yang melanda para pejabat. Suharyo menyampaikan seruan itu usai memberikan khotbah di gereja Katedral, Jakarta Pusat, Kamis

(25/12/2025). Suharyo meminta para pemimpin menggunakan jabatannya untuk kebaikan masyarakat. "Kalau sekarang kita membaca berita-berita, melihat televisi hari-hari ini, sudah sekian kali kita membaca berita bupati ini ditangkap KPK, gubernur itu, dan sebagainya. Ini kan artinya jabatannya tidak untuk mewujudkan kebaikan bersama, dia harus bertobat," kata Suharyo. Usulan tobat nasional tersebut tidak hanya ditujukan kepada para pejabat. Suharyo juga menyinggung kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada Agustus lalu, seraya mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk melakukan refleksi dan pertobatan bersama. "Maka beberapa waktu yang lalu, ketika sedang ramai-ramai akhir bulan

Agustus, saya memberanikan diri untuk mengatakan bangsa ini membutuhkan pertobatan nasional," tegas Suharyo. Dia menyampaikan, tobat nasional untuk mengembalikan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Pancasila. "Tapi dasarnya adalah pertobatan batin, memulihkan Allah, dan membaktikan hidup bagi Tuhan," ujarnya. Sebelumnya, KPK menggelar OTT sejak Rabu (17/12/2025) di sejumlah wilayah, yakni Banten, Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Untuk mengupas masih maraknya perilaku korupsi di Indonesia, berikut ini wawancara anggota Komisi III, Abdullah dan peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman.

ABDULLAH, Anggota Komisi III DPR

Tanpa Reformasi, OTT Terus Berulang



“ Fenomena ini menunjukkan bahwa dibutuhkan reformasi yang menyeluruh dan sistemik.

MARAKNYA jaksa yang terjaring OTT KPK kembali menjadi sorotan publik. Bagaimana pandangan Anda terhadap kondisi ini?

Fenomena ini menunjukkan bahwa dibutuhkan reformasi yang menyeluruh dan sistemik. Pembahasan tidak bisa dilakukan secara parsial, karena persoalan integritas harus ditangani dari hulu ke hilir.

Reformasi seperti apa yang menurut Anda paling mendesak untuk dilakukan?

Salah satu yang paling penting adalah pengawasan. Kejaksaan Agung harus menerapkan sistem

pengawasan yang melekat dan dilakukan secara terus-menerus terhadap seluruh jajaran, bukan hanya sesekali atau reaktif setelah terjadi pelanggaran.

Selain pengawasan, aspek apa lagi yang perlu dibenahi?

Transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting. Semua data yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Bagaimana dengan penindakan terhadap jaksa yang terbukti melanggar hukum atau kode etik?

Harus ada komitmen kuat dalam penerapan sanksi yang tegas. Siapa pun jaksa yang melanggar kode etik maupun hukum pidana harus ditindak tanpa pandang bulu. Ketegasan ini penting agar menjadi efek jera dan mencegah pelanggaran serupa terulang di masa depan.

Apakah DPR akan terus mengawal agenda reformasi Kejaksaan ini?

Tentu. DPR, khususnya Komisi III, akan terus mendorong dan mengawasi agar reformasi Kejaksaan benar-benar berjalan secara menyeluruh demi memperkuat integritas lembaga penegak hukum. ■ **ASI**

ZAENUR ROHMAN, Peneliti Pukat UGM

Korupsi Ada, Karena Ongkos Politik Tinggi



“ Perlu ada reformasi sistem kepartaian, terutama terkait demokratisasi.

MARAKNYA kepala daerah yang kembali terjaring operasi tangkap tangan KPK menjadi sorotan publik. Menurut Anda, apa akar utama persoalan ini?

Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada. *High cost politics* ini mendorong kepala daerah untuk mencari balik modal setelah terpilih. Karena itu, perlu ada reformasi sistem kepartaian, terutama terkait demokratisasi internal partai dan pendanaan partai politik.

Apa solusi jangka panjang yang bisa dilakukan untuk menekan biaya politik tersebut?

Solusi jangka panjangnya adalah merevisi undang-undang pemilu dan melakukan redesain sistem pemilihan kepala daerah agar biaya kontestasi jauh lebih murah. Bahkan, saya mengusulkan agar sebagian besar biaya pilkada ditanggung oleh negara. Dengan begitu, kontestan tinggal bertanding secara adil tanpa beban biaya besar.

Selain biaya politik, Anda juga menyoroti lemahnya fungsi APIP di daerah. Di mana letak masalahnya?

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat daerah itu gagal menagari kepala daerah dari perilaku menyimpang. Bukan

karena kapasitasnya lemah, tetapi karena secara struktural mereka berada di bawah kepala daerah. Ini membuat fungsi pengawasan menjadi tidak independen.

Apa yang perlu dilakukan agar fungsi APIP lebih efektif?

Desain kelembagaannya harus diubah. APIP tidak boleh dipilih dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Misalnya, APIP dipilih oleh Pemerintah pusat dan ditempatkan di daerah. Untuk kabupaten/kota, inspektorat bisa bertanggung jawab kepada gubernur, sementara inspektorat provinsi bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. ■ **ASI**